

KESETARAAN DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM BIDANG EKONOMI PADA MASYARAKAT TRADISIONAL SASAK DI DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Siti Nurul Khaerani*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang kesetaraan gender, bentuk ketidakadilan gender dan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi pada masyarakat tradisional Sasak di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Kesetaraan Gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik. Artikel ini membuktikan bahwa kesetaraan gender belum terwujud dalam bidang ekonomi pada masyarakat tradisional Bayan, karena partisipasi, akses dan manfaat belum sepenuhnya dinikmati oleh perempuan. Pada masyarakat Bayan terjadi ketidakadilan gender baik dalam bentuk pelabelan atau *stereotype*, penomorduaan (*subordination*), pemiskinan (*marginalisation*), dan beban ganda (*double burden*). Beberapa upaya telah dilakukan oleh aparat desa untuk mewujudkan kesetaraan gender akan tetapi masih bersifat netral gender, belum ada upaya untuk mereformasi tradisi untuk menetapkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki sehingga dapat lebih mendorong partisipasi, kontrol dan manfaat dalam bidang ekonomi bagi perempuan yang saat ini masih minim.

Kata kunci: ekonomi, kesetaraan, ketidakadilan dan gender.

PENDAHULUAN

Kesadaran akan kesetaraan gender telah menjadi wacana publik yang terbuka, sehingga hampir tidak ada sudut kehidupan manapun yang tidak tersentuh wacana ini. Gender telah menjadi prospektif baru yang sedang diperjuangkan untuk menjadi kontrol bagi kehidupan sosial, sejauh mana prinsip keadilan, penghargaan martabat manusia dan perlakuan yang sama dihadapan apapun antar sesama manusia termasuk laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.¹

Upaya mendorong terjadinya kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan pembangunan yang bias gender. Rendahnya partisipasi perempuan ditemukan dalam berbagai level dan bidang kegiatan pembangunan pada Negara-negara berkembang memaksanya untuk meratifikasi hasil konfensi dunia yang terkait dengan agenda gender. Di sini gender sebagai sebuah gerakan berangkat dari isu keprihatinan terhadap perempuan secara international mewarnai gerakan gender yang terjadi

* Dosen pada Fakultas Syariah UIN Mataram. Email: khaeranis@yahoo.com

¹ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, Cet I (Yogyakarta: Teras, 2009), 18.

pada Negara-negara peserta konversi tersebut.² Kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari penegakan hak-hak asasi manusia yang menjadi pembahasan khusus dalam forum-forum internasional sejak tahun 1980-an. Perhatian dunia semakin meningkat terhadap kesetaraan gender sebagai bagian penting dalam mencapai kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan. Gender dalam konteks ini diintegrasikan ke dalam pendekatan kesejahteraan universal yang menjadi bagian dari perangkat hukum dan kesepakatan internasional dibawah PBB. Adapun kesetaraan dan keadilan gender diterapkan melalui strategi *Gender Mainstreaming* atau pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan pematangan dari strategi *Gender and Development*.³

Walaupun demikian, diskriminasi gender masih berlangsung di berbagai kehidupan di seluruh dunia walaupun ditemukan banyak sekali kemajuan dalam kesetaraan gender pada beberapa dekade terakhir ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat beragam di berbagai negara dan kawasan, namun polanya sangat mengejutkan. Tidak ada satu kawasan pun di negara-negara berkembang berlaku kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kesenjangan gender terjadi begitu luas dalam hak akses terhadap dan kendali atas sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik. Meskipun perempuan dan anak perempuan menjadi pemikul langsung beban terberat dari ketidaksetaraan ini, beban itu akan diderita juga oleh masyarakat, dan pada akhirnya akan merugikan setiap orang.⁴

Upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender menjadi hal yang niscaya mengingat kesadaran masyarakat dunia sudah semakin tinggi dalam perlindungan hak asasi manusia. Kesadaran tersebut melahirkan sejumlah konvensi mengenai pembelaan terhadap hak-hak asasi perempuan. Diantaranya, konvensi tentang pengupahan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya (1951), konvensi tentang hak politik perempuan (1953), konvensi tentang kewarganegaraan perempuan yang menikah (1957), konvensi anti diskriminasi dalam pendidikan (1960), konvensi tentang persetujuan perkawinan, umur minimum bagi perkawinan dan pencatatan perkawinan (1962), dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (1979). Dan dalam konferensi HAM PBB di Wina tahun 1993 ditegaskan bahwa hak asasi perempuan adalah Hak Manusia (*Women's Rights are Human Rights*). Artinya perempuan dan laki-laki diakui setara sebagai manusia, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁵

² Remiswal, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*, Cet I (Yogyakarta: Graha Imu,2013), 2.

³ Mufidah, *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi & Konstruksi Sosial*, Cet II (Malang: UIN-Maliki Press,2010), 95.

⁴ The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Engendering Development, Alih Bahasa T.Marlita dengan judul *Engendering Development: Pembangunan Berperspektif Gender, Melalui Perspektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*, Cet 1 (Jakarta: Dian Rakyat, 2005), 1.

⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, Cet I (Yogyakarta: Kibar Press,2007), 59.

Di Indonesia sendiri sejak zaman Hindia Belanda, Raden Ajeng Kartini sudah mempelopori perlunya kebangkitan perempuan dalam kehidupan di keluarga, masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun hingga era teknologi informasi dan komunikasi sekarang, peran perempuan terutama di kalangan keluarga miskin masih terkesan termarjinalkan. Perempuan masih identik dengan urusan "Dapur, Sumur, dan Kasur". Pekerjaan perempuan terbatas pada mengurus rumah tangga seperti memasak di dapur, mencuci, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Realitas dalam masyarakat atau keluarga miskin biasanya sumber penghasilan keluarga mengandalkan suami. Padahal keluarga kurang beruntung itu umumnya berpendidikan rendah. Keterampilan juga rendah. Kondisi ini semakin tidak berdaya akibat mereka tidak memiliki modal usaha apalagi jaringan untuk mengembangkan usaha ekonomi keluarganya. Untuk mendongkrak keterpurukan keluarga-keluarga seperti itu sangat perlu peran serta perempuan. Para istri dari keluarga miskin perlu diberdayakan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah keluarga.⁶

Untuk itu kesetaraan dan keadilan gender ini seyogyanya terwujud pada semua lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin, baik masyarakat yang modern maupun yang tradisional. Walaupun dalam kenyataannya baik masyarakat modern maupun tradisional bisa menjadi korban ketidakadilan gender. Nusa Tenggara Barat(NTB) sendiri pada tahun 2013 berhasil dinobatkan sebagai juara satu untuk pencapaian MDGs (*millennium development goals atau tujuan pembangunan millennium*) tahun 2009-2012 secara akumulatif. MDGs merupakan komitmen kepala pemerintahan di dunia (189 negara) yang dirumuskan dan ditandatangani para Kepala Pemerintahan di Markas Besar PBB (New York) pada awal tahun 2000, awal mula abad 21. Isi komitmen tersebut adalah (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) mengendalikan HIV-AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) menjamin kelestarian lingkungan hidup dan (8) mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global.⁷ Walaupun demikian NTB sendiri merupakan Provinsi dengan capaian Indek Pembangunan Gender (IPG) terendah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yaitu sebesar 56,70 persen pada tahun 2011 dan 57,58 persen pada tahun 2012. Indek Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender.⁸

Sebagai kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara (KLU) terdiri dari 5 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Bayan. Di tingkat KLU peluang perempuan mendapatkan pekerjaan meningkat dalam 3 tahun terakhir, namun tingkat partisipasinya masih jauh lebih rendah dari laki-laki.

⁶ Oos M.Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 150.

⁷ Nusa Tenggara Barat: Antara MDGs dan IPM, <http://sitisanisah.wordpress.com/2014/01/page/4/>.

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013), 43.

Pada tahun 2013 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 36,36 persen.⁹ Ketertinggalan perempuan dalam ketenagakerjaan juga tercermin dari sumbangan pendapatan yang jauh lebih rendah dari laki-laki serta proporsi pengangguran yang lebih tinggi dari laki-laki. Sumbangan pendapatan perempuan di KLU pada periode 2010 – 2012 berada pada kisaran 25 persen, sementara sumbangan pendapatan laki-laki mencapai 75 persen.¹⁰ Sebagian besar penduduk KLU, baik perempuan maupun laki-laki bekerja pada sektor pertanian. Dan berdasarkan status pekerjaan, perempuan mendominasi status bekerja sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar. Pada tahun 2013 status pekerjaan perempuan yang berusaha sebesar 29 persen, buruh/karyawan 19 persen, pekerja bebas 21 persen dan pekerja keluarga 31 persen.¹¹

Di kawasan perkotaan, perempuan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan formal di perusahaan swasta atau di kantor-kantor pemerintahan dan seringkali terkungkung dalam pekerjaan illegal yang produktivitasnya rendah. Tidak legalnya pekerjaan yang dilakukan, seperti yang terjadi dalam industri garmen, membuat mereka berada di luar jangkauan peraturan resmi sehingga tidak dapat memperoleh manfaat hukum terkait upah minimum dan jaminan sosial. Bahkan ketika perempuan menerima bayaran upah konvensional dengan melakukan pekerjaan pabrik, peraturan mengenai upah minimum dan keselamatan kerja kemungkinan besar diabaikan. Demikian juga halnya perempuan di pedesaan kurang memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dan acap terhambat oleh peraturan yang membuat mereka terpaksa melakukan kompromi terhadap potensi perolehan penghasilan yang lebih layak. Peraturan perundang-undangan dan kebiasaan sosial sering kali menghambat perempuan untuk memiliki harta benda atau menandatangani kontrak keuangan tanpa disertai dengan tanda tangan suami. Dengan sedikit pengecualian, mengikuti program penciptaan lapangan kerja dan program peningkatan pendapatan pada umumnya diperuntukkan bagi laki-laki, sehingga menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan.¹²

Desa Bayan sendiri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bayan, KLU. Penduduk Desa Bayan sebanyak 5.150 orang terdiri dari 2.513 orang laki-laki dan 2.637 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.469 orang. Mayoritas penduduk di Desa Bayan adalah Muslim dan beretnis Sasak. Data yang terkait dengan lembaga kemasyarakatan pada daftar isian Desa Bayan hanya ada informasi terkait pengurus karang taruna, LPMD, organisasi kepemudaan dengan ruang lingkup sepak bola sebanyak 7 organisasi, yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan setingkat MTs sebanyak 1 yayasan, organisasi Tim Penggerak PKK desa dengan jumlah pengurus 32 orang. Tidak ada data

⁹ *Posfil Data Ketenagakerjaan Umum Provinsi, Pusdatinaker*, Balitfo, Kemenakertrans 2014.

¹⁰ KPPPA *Pembangunan Manusia Berbasis Gender* 2011, 2012 dan 2013.

¹¹ Lombok Utara Dalam Angka 2013

¹² Michel P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi 11 (Erlangga, Jakarta:2009), 293.

terkait lembaga ekonomi yang ada di Desa Bayan. Artikel ini akan mengkaji tentang “Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang Ekonomi pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”.

PEMBAHASAN

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal biasa sepanjang tidak mengakibatkan ketidakadilan gender. Akan tetapi, realitas di masyarakat menunjukkan perbedaan gender melahirkan berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa ketidakadilan gender terjadi semakin luas dan menyelimuti hampir semua kelompok perempuan? Sejumlah faktor ditenggarai sebagai penyebab dan yang paling mengemuka adalah tiga faktor utama: pertama dominasi budaya *patriarkal*. Seluruh elemen pembentuk kebudayaan kita memiliki watak yang memihak pada atau didominasi oleh kepentingan laki-laki. Kedua, interpretasi ajaran agama sangat didominasi oleh pandangan yang bias gender dan bias nilai-nilai *patriarkal*. Ketiga, hegemoni Negara yang begitu kuat.¹³

Ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk *marjinalisasi*, *kekerasan*, *subordinasi*, *stereotip* dan *beban ganda* telah terjadi di berbagai tingkatan masyarakat. Pertama wujud dari ketidakadilan gender terjadi di tingkat negara, baik pada suatu negara maupun organisasi antar negara. Banyak kebijakan dan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari wujud ketidakadilan gender. Kedua, wujud dari ketidakadilan ini juga terjadi di tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan. Banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian, dan kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan gender tersebut. Ketiga, dalam adat istiadat di banyak kelompok etnik masyarakat, kultur suku-suku maupun dalam tafsiran keagamaan wujud ketidakadilan gender ini pun terjadi. Keempat, ketidakadilan gender juga terjadi di lingkungan rumah tangga. Mulai dari proses pengambilan keputusan, pembagian kerja, hingga interaksi antara anggota keluarga, di dalam banyak rumah tangga sehari-hari asumsi bias gender ini masih digunakan. Kelima adalah ketidakadilan gender yang sudah mengakar di dalam suatu keyakinan dan menjadi idiologi bagi kaum perempuan maupun laki-laki, hal seperti ini sudah sangat sulit diubah.¹⁴

Adanya ketidakadilan gender dalam bentuk apapun baik berupa *marjinalisasi*, *subordinasi*, *stereotip*, kekerasan dan beban ganda yang dilakukan baik dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga maupun yang lebih besar yaitu negara akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena adanya ketidakadilan merupakan bagian dari tidak tercapainya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, akan

¹³ Mulia, *Islam...* 57-58

¹⁴ Nugroho, *Gender...* 48-49

tetapi sering kali pembakuan peran gender yang terjadi di masyarakat sangat berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk itu perlu diwujudkan adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.¹⁵ Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan gender maka perlu diwujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut.¹⁶

Kebijakan pembangunan yang mempertinggi perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan cenderung memburuk kesenjangan penghasilan serta semakin mengikis status ekonomi perempuan di dalam rumah tangga. Karena program-program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan sering kali lebih dikhusruskan kepada laki-laki, sedangkan program perluasan pertanian mengutamakan budidaya pertanian yang didominasi laki-laki yang seringkali sering mengorbankan lahan bagi perempuan untuk bercocok tanam sayuran. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan justru lebih memperberat beban kerja perempuan dan pada saat yang sama mengurangi bagian sumber daya rumah tangga yang dapat mereka kendalikan. Akibatnya, kaum perempuan dan orang-orang yang bergantung pada mereka tetap menjadi kelompok yang secara ekonomis paling rentan di negara-negara berkembang.¹⁷

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi baik bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan

¹⁵ Nugroho, *Gender,...* 60.

¹⁶ Nugroho, *Gender....*60

¹⁷ Michel P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan.....*, 295.

kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis gender yaitu menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang perempuan dan laki-laki untuk mengidentifikasi dan mengungkap kedudukan, fungsi, peran, tanggung jawab dan faktor-faktor yang mempengaruhi.¹⁸

Pada masyarakat Bayan akses dalam bidang ekonomi oleh beberapa informan mengatakan sama baik laki-laki maupun perempuan, semua warga dapat mengikuti kecuali anak-anak yang belum cukup umur. Seperti kita ketahui bahwa akses (*access*) merupakan kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki otoritas untuk memutuskan terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut. Jika berbicara tentang sumber daya, maka ada yang berbentuk fisik seperti uang, sawah, kebun, peralatan atau perabot dan ada yang nonfisik seperti pendidikan, waktu atau kesempatan, kepemimpinan, struktur hukum, representasi (perwakilan), dan lain sebaginya. Ada beberapa program pemerintah yang ada di Desa Bayan, seperti; raskin, pengembangan usaha masyarakat di bidang pertanian, pembinaan terhadap petani jambu mente dan cengkeh untuk meningkatkan jumlah hasil panen, pembagian gas gratis dari desa, bibit unggul, dan PKH. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pemberian raskin, gas elpiji gratis kontribusi perempuan yang lebih besar. Laki-laki pada program pengembangan usaha masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan lebih terkait dengan hal-hal yang lebih dekat dengan domestik atau rumah tangga maka perempuan lebih aktif, sedangkan terkait dengan pengembangan usaha maka laki-laki lebih aktif.

Secara umum kegiatan atau aktifitas ekonomi penduduk adalah bertani dan berdagang. Data kuantitatif menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 5.150 orang, maka 2.500 orang bekerja sebagai petani, atau 48,54% adalah petani, dari jumlah itu 1.232 orang (23,9%) laki-laki dan 1.268 orang (24,6%) adalah perempuan. Dengan demikian secara kuantitatif kegiatan dalam bidang pertanian lebih banyak perempuan. Data juga menunjukkan bahwa perempuan sebanyak 12 orang (100%) terlibat dalam kegiatan pengrajin industri rumah tangga dan tidak ada penduduk laki-laki yang terlibat. Demikian juga untuk pedagang keliling sebanyak 8 orang (100%) dari jumlah yang ada semua perempuan. Sedangkan untuk pengusaha kecil dan menengah data yang ada menunjukkan bahwa 36 orang laki-laki atau (55,4 %) dan 29 orang perempuan (44,6%).

Dari data yang ada juga menunjukkan bahwa terdapat pembagian pekerjaan berdasarkan gender, untuk petani, pengrajin industri rumahan, pedagang keliling mayoritas perempuan, sedangkan untuk usaha kecil dan menengah mayoritas laki-laki, demikian juga montir, jasa pengobatan alternatif mayoritas laki-laki. Dengan demikian kegiatan ekonomi perempuan lebih banyak pada kegiatan informal. Menurut Michel P. Todaro, Stephen C. Smith, dalam buku Pembangunan Ekonomi, Perempuan di pedesaan kurang memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dan acap terhambat oleh

¹⁸ Wawan Djunaedi dan Iklilah Muzayyanah, *Pendidikan...*,xxvii

peraturan yang membuat mereka terpaksa melakukan kompromi terhadap potensi perolehan penghasian yang lebih layak. Peraturan perundang-undangan dan kebiasaan sosial sering kali menghambat perempuan untuk memiliki harta benda atau menandatangani kontrak keuangan tanpa disertai dengan tanda tangan suami. Dengan sedikit pengecualian, mengikuti program penciptaan lapangan kerja dan program peningkatan pendapatan pada umumnya diperuntukkan bagi laki-laki, sehingga menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan.¹⁹

Jika dicermati di Desa Bayan, maka akses yang diberikan dalam bidang ekonomi masih lebih banyak laki-laki, sehingga partisipasi atau keterlibatan laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Bahkan Kepala Desa mengatakan bahwa sebanyak 57% adalah laki-laki dan 43% adalah perempuan. Dan sebagian besar mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi yang diadakan terutama oleh pemerintah, lebih kecil dari laki-laki, dengan kata lain yang lebih dominan adalah laki-laki.

Ada beberapa alasan kenapa partisipasi laki-laki lebih dominan, hal ini menurut beberapa informan antara lain karena program yang ada bertujuan untuk pengembangan usaha yang mereka lakukan, laki-laki dianggap mampu untuk mengolah dan dapat merealisasikan program yang diterapkan, keterlibatan laki-laki lebih dominan karena memberikan hasil pertanian yang lebih besar, selain itu ada angapan bahwa laki-laki lebih banyak terlibat karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tanggung jawab sebagai seorang suami atau karena untuk memberikan nafkah kepada istri adan anak-anak mereka. Sedangkan halangan dari perempuan untuk aktif dan berpartisipasi antara lain adalah terkendala dengan kesibukan untuk mengurus rumah tangga, ada juga yang menganggap bahwa akses yang diberikan oleh pemerintah desa kurang kepada perempuan untuk terlibat bahkan ada yang mengatakan bahwa ketahan fisik yang lemah menjadikan halangan bagi perempuan untuk lebih aktif dan berpartisipasi. Menurut seorang informan kesetaraan gender harusnya diutamakan, sehingga baik laki-laki dan perempuan bebas melakukan pekerjaan masing-masing.

Dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa akses dan partisipasi dari masyarakat Bayan terutama untuk perempuan dalam bidang ekonomi masih terbatas. Walaupun sebagian mengatakan akses sama tapi partisipasi perempuan masih dibatasi dengan beragam alasan yang merupakan bentukan dari konstruksi sosial masyarakat Bayan sendiri. Konstruksi sosial yang dibentuk membuat salah satu jenis kelamin dalam hal ini perempuan menjadi terbatas akses dan partisipasinya, perempuan dianggap lemah, karena fisik yang lemah sedangkan laki-laki dianggap sebagai manusia yang kuat, yang menjadi tulang punggung. Laki-laki harus bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga mereka lebih banyak dilibatkan. Sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap saja dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Akibatnya kontrol terhadap kegiatan ekonomi di Desa Bayan juga kurang. Walaupun menurut mereka manfaat dari program ekonomi yang dilaksanakan dirasakan oleh semua warga, baik laki-laki

¹⁹ Michel P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, 293

maupun perempuan. Akan tetapi jika melihat dari kondisi riil yang ada, bahwa partisipasi perempuan lebih sedikit, sedangkan data kuantitaif menunjukkan bahwa dalam bidang pertanian saja lebih banyak perempuan. Seharusnya perempuan diberikan akses yang lebih banyak untuk terlibat dalam kegiatan, sehingga dapat lebih meningkatkan hasil produksi pertanian dan dapat meningkatkan pendapatan.

Partisipasi dari perempuan di Desa Bayan untuk terlibat dalam produktivitas ekonomi yang lebih besar terhalang oleh konstruksi sosial dari peran gender itu sendiri. Seperti kewajiban dari perempuan untuk mengerjakan hal-hal domestik sedangkan tidak untuk laki-laki. Selain itu perempuan tidak memiliki kontrol dan kebebasan dalam menentukan aktivitas ekonominya. Seperti pilihan-pilihan pekerjaan termasuk yang bernilai ekonomis. Hal ini karena adanya konstruksi budaya terkait dengan peran perempuan juga mempengaruhi partisipasi perempuan untuk lebih produktif. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi kualitas dari angkatan kerja di mana data kuantitatif menunjukkan bahwa pada usia 18-56 tahun perempuan lebih banyak yang buta aksara dan huruf angka latin (314 orang perempuan dan 257 orang laki-laki), demikian juga untuk tingkat pendidikan, perempuan lebih rendah dari laki-laki. Ada beberapa kendala yang menjadi hambatan produktivitas dalam bidang ekonomi adalah keterampilan atau *skill*, kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh warga Bayan sendiri yang masih kurang karena rendahnya tingkat pendidikan.

Adanya akses dan partisipasi perempuan yang terbatas juga disebabkan karena tidak adanya kontrol dari perempuan terhadap pengambilan keputusan dalam keluarga. Faktor kontrol merupakan kemampuan atau otoritas untuk memutuskan penggunaan produk atau hasil bahkan juga menentukan metode pendayagunaannya, sehingga memiliki kekuatan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya tersebut. Pada masyarakat Bayan sebagian informan mengatakan bahwa yang menentukan atau yang membuat keputusan dalam keluarga terkait dengan ekonomi adalah laki-laki atau ayah dengan beragam alasan misalnya karena laki-laki adalah kepala keluarga sehingga putusan harus diambil oleh laki-laki selaku penanggungjawab di rumah tangganya. Ibu dapat memberikan dukungan atas apa yang diputuskan suaminya. Perempuan sudah sibuk dengan mengurus rumah tangga, sehingga tidak perlu terlibat banyak di luar rumah, walaupun untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan baik sebagai petani, maupun pedagang. Lagi-lagi faktor konstruksi sosial bahwa perempuan kodratnya menjaga anak menjadikan perempuan hanya sebagai ibu yang mengurus rumah tangga saja.

Dari uraian di atas dalam hal kendalapun masih terdapat anggapan yang keliru tentang perempuan, konstruksi sosial menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah yang tidak memiliki keinginan untuk maju. Pemahaman gender sebagai sebuah konstruksi sosial tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh sistem dimana keduanya berada pada kenyataannya dikonstruksikan oleh kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi sosial, kultural, bahkan fiskal karena sebagaimana halnya kenyataan kekuasaan adalah identik

dengan kepemimpinan.²⁰ Kita berharap pada masyarakat Bayan pun pun terjadi perubahan pemahaman tentang gender, seperti daerah lain. Sehingga keterlibatan perempuan dalam aktifitas ekonomi akan lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan ketahanan keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan kesetaraan gender dalam pembangunan bidang ekonomi di desa Bayan masih belum dapat diwujudkan. Karena akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam bidang ekonomi masih terbatas pada salah satu jenis kelamin yaitu laki-laki. Kesetaraan gender dalam pembangunan bidang ekonomi akan terwujud jika akses perempuan dan laki-laki sama dalam produktivitas di suatu wilayah. Demikian juga dengan partisipasi, kontrol terhadap sumber daya yang didapatkan.

Jika kita menelaah kembali pengertian dari pembangunan (*development*) secara umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju ke arah yang lebih baik. Maka pembangunan di Desa Bayan belum memberikan perbaikan ke arah yang lebih, karena akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Bayan terutama bagi perempuan. Banyak kendala yang dihadapi terutama terkait dengan konstruksi sosial terhadap peran, fungsi dan kedudukan dari perempuan sendiri maupun terkait dengan budaya setempat. Karena seperti kita ketahui kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri.²¹ Akan tetapi pada masyarakat Bayan perubahan terkait dengan kesetaraan gender dalam pembangunan bidang ekonomi belum sepenuhnya terwujud.

Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang tidak berkesetaraan tidak saja terjadi di Desa Bayan, di beberapa desa tradisional hal ini juga terjadi, perempuan sering kali tidak mendapat akses yang sama dengan laki-laki, baik pada pelayanan bidang pendidikan, kesehatan maupun dalam bidang ekonomi. Dalam bidang pendidikan saja, data yang ada di Desa Bayan menunjukkan bahwa persentase perempuan Desa Bayan yang buta aksara lebih tinggi, sarana pendidikan yang ada hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama, akibatnya kontruksi sosial yang mengatakan bahwa perempuan lemah membuat khawatir keluarga untuk menyekolahkan anaknya di luar lingkungan mereka. Dan akibatnya daya tawar perempuan rendah, karena minimnya pendidikan. Demikian juga dalam bidang kesehatan angka kematian ibu melahirkan juga tinggi, apalagi sarana kesehatan yang ada sangat minim. Data kuantitatif menunjukkan bahwa sarana prasarana hanya satu. Pendidikan rendah, sarana kesehatan yang minim, membuat perempuan menjadi subordinat.

Bentuk Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Realitas di masyarakat menunjukkan perbedaan gender melahirkan berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun bagi

²⁰ Nugroho, *Gender...*,19.

²¹ Oos M.Anwas mengutip Susanto (2008) dalam Oos M.Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2013), 41.

perempuan. Sejumlah faktor ditenggarai sebagai penyebab dan yang paling mengemuka adalah tiga faktor utama: pertama dominasi budaya *patriarkal*. Seluruh elemen pembentuk kebudayaan kita memiliki watak yang memihak pada atau didominasi oleh kepentingan laki-laki. Kedua, interpretasi ajaran agama sangat didominasi oleh pandangan yang bias gender dan bias nilai-nilai *patriarkal*. Ketiga, hegemoni Negara yang begitu kuat.²² Sehingga sangat jelas sekali bahwa perempuan lebih banyak mengalami perlakuan tidak adil karena jenis kelamin, hal ini akibat pandangan dari masyarakat sendiri yang keliru mengenai peran apa yang harus dilakukan oleh perempuan dan apa saja yang harus dilakukan oleh laki-laki baik dalam kehidupan berkeluarga maupun masyarakat.

Pada masyarakat Bayan, walaupun sebagian informan mengatakan bahwa tidak ada anggapan ataupun kontruksi tetapi secara tidak sadar hal itu terjadi, di mana perbedaan gender melahirkan ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin terutama perempuan. Sehingga faktor dominasi budaya patriarki menyebabkan terjadi ketidakadilan gender, seperti pelabelan (*stereotype*), subordinasi, pemiskinan (*marginalisasi*) dan beban ganda. Ketidakadilan gender ini disengaja atau tidak telah dilakukan oleh masyarakat yang disebabkan konstruksi sosial yang ada di masyarakat Bayan karena mempertahankan tradisi dan budaya. Berikut ini bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi pada masyarakat desa Bayan:

Pelabelan atau stereotype

Pelabelan adalah persepsi, asumsi, maupun nilai dalam sebuah masyarakat. Terdapat dua macam pelabelan berbasis gender di dalam masyarakat, yaitu pelabelan negatif dan positif. Hanya saja pelabelan negatif jauh lebih banyak dari positif. Dan ironisnya pelabelan negatif banyak dilekatkan kepada perempuan. Misalnya, perempuan diasumsikan makhluk lemah, selalu tergantung pada orang lain, tidak tegas, mudah terpengaruh, emosional, mudah ditundukkan dan irrasional.²³

Pada masyarakat, adanya *stereotip* (pelabelan) ini menyebabkan banyak tindakan-tindakan yang seolah-olah sudah merupakan kodrat. Misalnya, karena secara sosial budaya laki-laki dikonstruksikan sebagai kaum yang kuat, maka laki-laki dari kecil terbiasa atau terlatih untuk menjadi kuat. Dan perempuan yang sudah terlanjur mempunyai label lemah lembut, maka perlakuan orang tua mendidik anak seolah-olah mengarahkan untuk terbentuknya perempuan yang lemah lembut. Dan Kondisi riil yang ada di masyarakat Bayan masih banyak terjadi ketidakadilan gender seperti yang disampaikan oleh beberapa informan bahwa perempuan di *stereotype* sebagai makhluk yang fisiknya lemah, sehingga yang lebih banyak berpartisipasi dalam program ekonomi adalah laki-laki. Hal ini menurut mereka karena laki-laki memiliki ketahanan fisik terhadap pekerjaan berat yang akan dipikulnya seperti bertani dan lain sebagainya.

Adanya kebijakan pembangunan yang mempertinggi perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan cenderung memburuk kesenjangan

²² Mulia, *Islam...* 57-58

²³ Wawan Djunaedi dan Iklilah Muzayyanah, *Pendidikan...*, 17

penghasilan serta semakin mengikis status ekonomi perempuan di dalam rumah tangga. Karena program-program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan sering kali lebih dikhawasukan kepada laki-laki, sedangkan program perluasan pertanian mengutamakan budidaya pertanian yang didominasi laki-laki yang seringkali sering mengorbankan lahan bagi perempuan untuk bercocok tanam sayuran. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan justru lebih memperberat beban kerja perempuan dan pada saat yang sama mengurangi bagian sumber daya rumah tangga yang dapat mereka kendalikan. Akibatnya, kaum perempuan dan orang-orang yang bergantung pada mereka tetap menjadi kelompok yang secara ekonomis paling rentan di negara-negara berkembang.²⁴

Walaupun beberapa informan juga ada yang membantah tentang *stereotype* pada salah satu jenis kelamin dengan mengatakan bahwa program dilakukan secara merata, dan tergantung pada proporsinya masing-masing, maka dalam setiap program pada umumnya dilakukan atas dasar untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tetapi pada kenyataannya masyarakat di Desa Bayan menanggap bahwa laki-laki lebih mampu dari perempuan sebab dilihat dari psikologisnya masing-masing maka laki-laki lebih kuat bekerja. Dan ini tidak bisa dipungkiri dari kenyataan yang ada, bahwa partisipasi dan keterlibatan perempuan lebih sedikit dari laki-laki.

Subordinasi (penomorduaan)

Penomorduaan (*subordination*) adalah perlakuan menomor duakan yang mengakibatkan seseorang menempati posisi lebih rendah dibandingkan dengan orang lain, sehingga tidak mendapatkan prioritas. Istilah ini mengacu pada peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini berawal dari pembagian kerja berdasarkan gender dan dihubungkan dengan fungsi perempuan sebagai ibu. Sehingga kemampuan perempuan yang juga sebagai ibu digunakan sebagai alasan untuk membatasi peran perempuan hanya pada peran domistik dan pemeliharaan anak, atau bisa dikatakan jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan. Dan akibatnya menggiring perempuan sebagai tenaga kerja yang tidak produktif dan tidak menyumbang kepada proses pembangunan.

Termasuk dalam praktik penomorduaan adalah menganggap seseorang tidak mampu atau tidak penting, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun kegiatan lain. Penomorduaan berbasis gender lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki. Tidak jarang terjadi di masyarakat, perempuan dinggap tidak memiliki kemampuan, sehingga tidak dilibatkan dalam proses musyawarah atau aktivitas penting. Berbagai tindakan penomorduaan terhadap perempuan sangat dipengaruhi oleh sistem budaya. Dalam sosial kemasyarakatan misalnya, bentuk subordinasi bisa dilihat ketika perempuan selalu ditempatkan pada seksi konsumsi dari pada posisi yang lebih strategis. Alasannya klasik, karena perempuan dianggap terampil mengurus berbagai kebutuhan logistik dibandingkan dengan laki-laki. Dengan terus menerus ditugaskan sebagai seksi konsumi, tentu mengakibatkan perempuan kehilangan kesempatan untuk berlatih

²⁴ Michel P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan*, 295.

mencoba posisi yang lebih strategis. Pada akhirnya, perempuan tidak memiliki kontrol terhadap berbagai keputusan maupun kebijakan yang bersifat strategis dalam sebuah kegiatan atau forum.

Dan hal di atas juga terjadi pada masyarakat Bayan dalam pembangunan bidang ekonomi, misalnya laki-laki diutamakan untuk aktif, perempuan hanya mengurus anak dan hasil pertanian suami. Perempuan di Desa Bayan lebih banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan domistik, seperti program raskin (beras miskin) dan pembagian gas gratis. Sedangkan laki-laki banyak terlibat dalam hal-hal peningkatan pendapatan ekonomi yang diadakan oleh pemerintah desa. Sehingga dengan menjadi makhluk nomor dua, dan dianggap bukan pencari nafkah utama, tidak menjadi prioritas dalam ikut kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan bidang ekonomi perempuan dibatasi bekerja pada sektor-sektor tertentu. Laki-laki lebih banyak bekerja pada sektor produktif seperti yang mendatangkan upah, sedangkan perempuan hanya pada batas-batas sawah, usaha rumahan dan pedagang keliling.

Pemiskinan (*Marginalization*)

Bentuk ketidakadilan gender berikutnya adalah pemiskinan (*marginalization*), yaitu menempatkan seseorang karena jenis kelaminnya sebagai pihak yang tidak dianggap penting karena faktor ekonomi, sekalipun sebenarnya perannya sangat krusial. Proses penyisihan terhadap perempuan ini banyak terjadi di negara berkembang. Hal ini bisa terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan negara. Salah satu contoh proses marginalisasi bagi perempuan adalah kontribusinya untuk menopang ekonomi keluarga sering kali diabaikan, tidak diperhitungkan, bahkan tidak dihargai. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Bayan, perempuan tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Karena hanya sebatas pencari nafkah tambahan. Sehingga peran istri sering diabaikan. Suami beranggapan bahwa dia yang bekerja mencari uang. Padahal di lain pihak, apabila tugas rumah tangga yang dilakukan istri dinilai dengan uang, maka juga akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perekonomian keluarga. Oleh karena tidak menghasilkan uang maka mayoritas istri sangat tergantung kepada suaminya. Akibat adanya beban ganda maka perempuan di Bayan mau tidak mau akhirnya memilih pekerjaan yang bisa dikerjakan paruh waktu. Misalnya berdagang usaha kecil dirumah, menjadi kader posyandu dan mengurus urusan rumah tangga. Perempuan tidak memiliki pilihan dalam pekerjaan. Hal ini juga akibat pendidikan yang terbatas di mana perempuan tidak menjadi prioritas dalam sekolah mengakibatkan daya saing dari perempuan menjadi rendah. Akibatnya perempuan menjadi tidak produktif.

Beberapa contoh marginalisasi yang banyak terjadi di masyarakat tidak hanya di Desa Bayan antara lain; pemupukan dan pengendalian hama dengan teknologi baru dan laki-lakilah yang mengerjakan, pemotongan padi dengan peralatan sabit, mesin yang hanya membutuhkan tenaga dan keterampilan laki-laki, mengantikan tangan perempuan dengan alat panen ani-ani, sedangkan perempuan banyak diperkerjakan hanya usaha konveksi, peluang menjadi pembantu rumah tangga, guru taman kanak-kanak, perawat, bidan dan sekretaris. Jika dilihat di Desa Bayan,

maka tenaga kerja seperti bidan, industri rumahan, pembantu rumah tangga 100% adalah perempuan, sedangkan montir, usaha kecil dan menengah lebih didominasi laki-laki.

Pada masyarakat Bayan, data kuantitatif menunjukkan sekitar 24,9% adalah petani perempuan, sedangkan laki-laki adalah 23,9% laki-laki. Akan tetapi akses untuk mendapatkan penuluhan pertanian seperti peningkatan hasil panen lebih banyak laki-laki. Hal ini jangan sampai menyebabkan perempuan menjadi tersingkir dan miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya dimiliki lebih banyak oleh orang laki-laki. Perkembangan teknologi juga menyebabkan apa yang semula dikerjakan manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh laki-laki.

Beban Ganda (Double Bourden)

Bentuk ketidakadilan gender yang kelima adalah beban ganda (*double bourden*). Beban ganda terjadi karena adanya dikotomi peran publik dan peran domestik terhadap laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan mau tak mau harus mengemban beban ganda. Peran ganda adalah adanya dua pekerjaan bahkan lebih yang harus diemban oleh perempuan. Perempuan seringkali tidak memiliki pilihan kecuali menjalani peran ganda tersebut demi kelangsungan hidupnya. Seperti kehidupan seorang ibu yang harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sementara pada saat berbarengan ia dituntut bertanggungjawab terhadap peran domestiknya. Hal seperti ini juga dialami oleh perempuan di Desa Bayan. Jika akan berkerja maka perempuan di Bayan juga harus mengurus rumah tangganya seperti memasak, merawat anak dan pekerjaan domestik lainnya. Karena peran gender yang dikonstruksikan menwajibkan perempuan untuk bertanggung jawab pada sektor domestik yaitu rumah tangga menyebabkan sebagian perempuan di Bayan tidak terlibat aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan laki-laki karena menganggap bahwa pekerjaan domestik bukan menjadi tanggung jawab dari laki-laki sehingga mereka lebih leluasa untuk aktif dan berpartisipasi.

Kondisi di Bayan menunjukkan bahwa beban ganda merupakan bagian terbesar dalam permasalahan sosial terkait dengan relasi gender. Karena dari seluruh informan semua mengatakan bahwa beban ganda menyebabkan sebagian perempuan di desa Bayan tidak mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam program ekonomi yang di adakan di desa. Bagi sebagian besar masyarakat Bayan mengurusi rumah tangga merupakan tanggung jawab seorang wanita. Perempuan terlalu sibuk untuk mengurusi rumah tangga, terutama anak-anak mereka yang masih kecil, Sehingga tidak banyak perempuan melakukan pekerjaan yang beda dalam satu waktu. Kalaupun ada perempuan yang mampu untuk melakukan pekerjaan ganda, maka kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan berdagang, menjadi kader posyandu yang hanya memakan separuh waktu sehingga mampu mengurus rumah tangga juga.

Jika kita cermati, maka beban ganda bagi perempuan seharusnya bisa diatasi dengan kerjasama yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Persentase perempuan sebagai petani yang lebih banyak seharusnya diapresiasi dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan ilmu. Akses yang diberikan kepada desa tidak hanya untuk laki-laki saja ketika ada penyuluhan maupun pelatihan. Kaum perempuan juga perlu diberikan akses untuk mendapatkan tambahan keilmuan, sehingga bisa lebih produktif. Alasan menjaga anak, mengurus keluarga merupakan alasan yang klise jika antara suami dan istri bisa berbagi beban keluarga dan pekerjaan rumah tangga.

Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi pada Masyarakat Tradisional Bayan Kabupaten Lombok Utara

Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan, dapat diketahui dari rendahnya atau minimnya peluang yang dimiliki oleh perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, informasi maupun teknologi dan juga akses ke pasar, kredit dan modal kerja. Seperti diketahui walaupun kontribusi dari penghasilan perempuan untuk keluarga cukup signifikan namun perempuan tetap saja dianggap pencari nafkah tambahan bagi keluarga.

Pemerintah sendiri telah menetapkan pengarusutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik, jabatan politik, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, hal ini bertujuan untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi.

Kesetaraan gender adalah isu pembangunan yang paling mendasar untuk tujuan pembangunan itu sendiri. Kesetaraan akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan demikian, meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan yang mengupayakan pemberdayaan semua orang perempuan maupun laki-laki untuk melepaskan diri dari kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup.²⁵

Dari hasil informasi yang didapatkan dengan informan baik tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun aparat desa, beberapa upaya telah dilakukan oleh mereka dalam mewujudkan kesetaraan gender seperti: penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat untuk meningkatkan kinerja masyarakat dalam usaha pertanian, peningkatan SDM masyarakat melalui pengembangan usaha, dan pelatihan-pelatihan lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan masih terkesan netral gender, padahal kondisi yang ada perempuan dalam segala bidang ekonomi masih terkendala akan akses,

²⁵The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Engendering... 1.

partisipasi, kontrol dan manfaat yang didapatkan dari pembangunan itu sendiri. Sehingga perempuan perlu didukung agar tidak tertinggal jauh dengan laki-laki. Untuk itu baik tokoh agama, masyarakat maupun aparat desa perlu melakukan beberapa strategi untuk dapat mewujudkan kesetaraan gender. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Mereformasi tradisi untuk menetapkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama antara tokoh agama, tokoh masyarakat dan dengan aparat desa serta warga untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama. Hal ini penting dilakukan karena dalam beberapa hal, tradisi masih berpihak pada salah satu jenis kelamin saja.
- b. Mendorong pemerintah untuk ikut terlibat dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi di lingkungan masyarakat Bayan dengan menciptakan kesempatan kerja baru yang menguntungkan perempuan dan laki-laki, melalui penciptaan lebih banyak kesempatan kerja, peningkatan pendapatan serta perbaikan standar hidup. Kesempatan kerja diberikan sama baik kepada laki-laki maupun perempuan, tidak ada halangan akibat peran gender yang menghambat salah satu jenis kelamin untuk berpartisipasi dalam hal produktif.
- c. Bertindak aktif mengatasi ketidaksetaraan. Beberapa intervensi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: meningkatkan kesetaraan gender dalam akses ke sumberdaya produktif dan sumber penghasilan, mengurangi beban perempuan akibat peran domestik mereka, meningkatkan partisipasi dan aspirasi politik perempuan. Hal nyata yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender. Bahwa setiap warga memiliki hak yang sama dalam segala aspek pembangunan termasuk dalam bidang ekonomi.

Bagaimanapun juga kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari penegakan hak-hak asasi manusia yang menjadi pembahasan khusus dalam forum-forum internasional sejak tahun 1980-an. Perhatian dunia semakin meningkat terhadap kesetaraan gender sebagai bagian penting dalam mencapai kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan.

Kaum perempuan paling berpotensi mendapatkan perlakuan diskriminatif, walaupun laki-laki juga tidak menutup kemungkinan mendapat perlakuan yang sama. Akan tetapi budaya patrilinial menyebabkan perempuan sering menjadi korban. Jika kita cermati sebenarnya program dan kegiatan yang ada di desa juga bisa memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga baik laki-laki maupun perempuan, hanya saja kendala-kendala budaya dan tradisi di desa sering kali menempatkan kaum perempuan menjadi subordinat, perempuan dinomorduakan, terutama ketika sudah masuk ke ranah domestik, maka semua hal yang dekat dengan masalah domestik menjadi tanggunga jawab perempuan. Akibatnya perempuan menjadi seolah-olah kehabisan waktu untuk dirinya sendiri, terutama untuk mengembangkan kemampuan diri. Dan hal ini banyak terjadi di

daerah pedesaan, walaupun tidak menutup kemungkinan di daerah perkotaan juga terjadi. Kita mengetahui bahwa kekerasan berbasis gender tidak mengenal tempat. Akan tetapi dengan kondisi yang ada di desa menyebabkan perempuan di pedesaan banyak menjadi korban. Dan jika hal ini terus terjadi maka kemajuan pembangunan akan sulit dicapai. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan sebuah negara dimulai dari desa, sehingga jika desa maju maka negara juga akan maju. Untuk itu niscaya akan terwujud sebuah negara yang memiliki pembangunan berkesetaraan gender jika di desa saja, masih banyak terdapat ketidakadilan gender di masyarakat. Termasuk dalam lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Sehingga sangat perlu untuk mensosialisasikan relasi gender yang berkesetaraan mulai dari tingkat keluarga.

SIMPULAN

Kesetaraan gender dalam pembangunan pada masyarakat tradisional Desa Bayan belum sepenuhnya terwujud. Hal ini nampak dari terbatasnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam bidang ekonomi pada salah satu jenis kelamin yaitu perempuan. Dalam bidang ekonomi partisipasi perempuan di Desa Bayan masih sangat minim. Ini disebabkan oleh konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga laki-laki menjadi prioritas dalam bidang ekonomi karena anggapan laki-laki adalah tulang punggung keluarga dan harus bertanggung jawab terhadap keluarga.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam pembangunan yang terjadi dalam masyarakat tradisional Desa Bayan antara lain *pertama* pelabelan atau *stereotype* yaitu anggapan bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah sehingga tidak bisa bekerja, sedangkan laki-laki mampu untuk mengolah dan dapat merealisasikan program yang diterapkan, *Kedua* penomorduaan (*subordination*) seperti bukan pencari nafkah utama sehingga tidak menjadi prioritas untuk aktif dalam kegiatan pengembangan ekonomi. *Ketiga* pemiskinan (*marginalization*), dengan tidak diberikannya kebebasan bagi perempuan untuk menentukan pekerjaan yang produktif yang bisa dilakukan oleh perempuan. Perempuan di Desa Bayan lebih banyak sebagai petani dan bukan dianggap pekerja utama tapi lebih bersifat membantu suami, selain itu juga pilihan pekerjaan lainnya adalah pedagang rumahan. Keempat, beban ganda (*double burden*) yaitu, jika akan berkerja maka perempuan di Desa Bayan juga harus mengurus rumah tangganya seperti memasak, merawat anak dan pekerjaan domestik lainnya. Sedangkan laki-laki karena menganggap bahwa pekerjaan domestik bukan menjadi tanggung jawab dari laki-laki sehingga mereka lebih leluasa untuk bekerja dan bebas kemanapun juga. Termasuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di Desa Bayan.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh aparat desa untuk mewujudkan kesetaraan gender akan tetapi masih bersifat netral gender, seperti penyuluhan peningkatan hasil panen, pelatihan keterampilan, akan tetapi yang lebih banyak yang terlibat adalah laki-laki. Belum ada upaya untuk mereformasi tradisi untuk menetapkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki

sehingga dapat lebih mendorong partisipasi, kontrol dan manfaat dalam bidang ekonomi bagi perempuan yang saat ini masih minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas M Oos., *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Djunaedi, Wawan dan Iklilah Muzayyanah, *Pendidikan Islam Adil Gender di Madrasah*, Cet I, (Jakarta: Pustaka STAINU bekerjasama dengan LP3M STAINU Jakarta dan European Union, 2008).
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penilaian Gender*, Cet II (Malang, UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang: 2006).
- KPPPA Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011,2012 dan 2013.
- J,Creswell, 1994. Research Desgin, dalam Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2010).
- Lombok Utara Dalam Angka 2013,BPS KLU
- Muawanah Elfi, *Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia*,Cet I,(Yogyakarta: Teras, 2009).
- Mufidah, *Bingkai Sosial Gender:Islam, Strukturasi & Konstruksi Sosial*, Cet II (Malang: UIN-Maliki Press,2010).
- Mulia, Siti Musdah dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender(Perspektif Islam)*, Cet II (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2001).
- Mansoer Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Mosse, Julia Cleves, *Gender & Pembangunan*, Cet V (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's)
- Nugroho, Riant, *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi*, Cet I (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008).
- Nikmatullah dan Erma Suriani, *Pengantar Studi Gender*, (LKIM IAIN Mataram: 2005).
- Pofil Data Ketenagakerjaan Umum Provinsi, Pusdatinaker, Balitfo, Kemenakertrans 2014.
- Profil Gender Kabupaten Lombok Utara*, diterbitkan oleh AIPD, Jakarta, 2014,
- Remiswal, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*,Cet I (Yogyakarta: Graha Imu,2013).
- The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Engendering Development, Alih Bahasa T.Marlita dengan judul *Engendering Development: Pembangunan Berperspektif Gender, Melalui Perspektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*, Cet 1 (Jakarta: Dian Rakyat, 2005).
- Todaro, Michel P., Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi 11 (Erlangga, Jakarta:2009).